



Integrasi Bangsa Indonesia dalam Perspektif Budaya Jerman: Sebuah Kajian Perbandingan

Anjeli Zega^{1*}, Christian Siahaan², Moses Sitinjak³, Vidi Daniel O Manurung⁴

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Medan, Indonesia

*E-mail Koresponden: anjelizega91@gmail.com

Info Artikel :

Diterima :
01 September 2025

Disetujui :
29 September 2025

Dipublikasikan :
30 September 2025

ABSTRAK

Integrasi bangsa merupakan faktor penting yang harus di jaga terutama dalam persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Di era globalisasi, tantangan integrasi bangsa semakin kompleks, khususnya akibat polarisasi sosial, politik, dan budaya. Tujuan dari Penelitian ini untuk menganalisis konsep integrasi bangsa Indonesia dengan membandingkannya pada perspektif budaya Jerman yang dikenal menjunjung tinggi kedisiplinan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif-komparatif, melalui analisis literatur tentang nilai-nilai integrasi di kedua negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia menekankan integrasi bangsa melalui Pancasila, semangat gotong royong, dan bahasa persatuan sebagai identitas nasional. Sementara itu, Jerman menekankan integrasi melalui disiplin sosial, integritas individu, dan transparansi hukum. Perbandingan ini menunjukkan bahwa kedua negara memiliki titik temu dalam menjunjung kejujuran dan tanggung jawab, namun berbeda dalam implementasi: Indonesia menekankan nilai kolektif, sedangkan Jerman menekankan konsistensi individu. Implikasi dari kajian ini adalah perlunya Indonesia mengadopsi nilai-nilai kedisiplinan dan transparansi Jerman tanpa meninggalkan kekuatan budaya gotong royong sebagai fondasi integrasi bangsa.

Kata Kunci: Integrasi Bangsa, Budaya Jerman, Pancasila, Gotong Royong, Perbandingan

ABSTRACT

National integration is an essential factor that must be maintained, especially in preserving unity and solidarity within Indonesia's diverse society. In the era of globalization, the challenges to national integration are becoming increasingly complex, particularly due to social, political, and cultural polarization. The purpose of this study is to analyze the concept of national integration in Indonesia by comparing it with the cultural perspective of Germany, which is known for upholding discipline, honesty, and social responsibility. The method applied is a literature review with a qualitative-comparative approach, through the analysis of literature on integration values in both countries. The findings indicate that Indonesia emphasizes national integration through Pancasila, the spirit of gotong royong (mutual cooperation), and the national language as a unifying identity. Meanwhile, Germany emphasizes integration through social discipline, individual integrity, and legal transparency. This comparison shows that both countries share common ground in upholding honesty and responsibility, yet differ in implementation: Indonesia emphasizes collective values, while Germany focuses on individual consistency. The implication of this study is that Indonesia needs to adopt Germany's values of discipline and transparency without abandoning the cultural strength of gotong royong as the foundation of national integration.

Keywords: National Integration, German Culture, Pancasila, Gotong Royong, Comparison



©2025 Penulis. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang dikenal dengan keragaman budaya, bahasa, dan agama yang luar biasa. Keragaman ini, sebagaimana dijelaskan oleh Jamrizal et al. (2025), adalah modal sosial yang besar dan merupakan sumber kekuatan bangsa. Namun, Jamrizal et al. (2025) juga mengingatkan, tanpa pengelolaan yang tepat, potensi perpecahan dapat muncul dan mengancam persatuan nasional. Oleh karena itu, integrasi bangsa menjadi sebuah keniscayaan, suatu proses berkelanjutan yang esensial untuk menjaga kohesi sosial di tengah pluralitas yang dinamis. Tantangan ini semakin kompleks seiring dengan globalisasi dan perkembangan teknologi yang mempercepat interaksi antarbudaya. Dalam pencarian model integrasi, Jerman menawarkan studi kasus yang menarik dan kaya akan pelajaran. Negara ini memiliki pengalaman panjang dalam mengelola integrasi, terutama setelah reunifikasi yang menyatukan kembali Jerman Timur dan Jerman Barat pada tahun 1990. Proses ini, yang digambarkan

oleh Pickel & Pickel (2023) bukanlah sekadar penyatuan wilayah, melainkan sebuah proses rekonsiliasi sosial dan budaya yang kompleks. Pickel & Pickel (2023) mencatat bahwa perbedaan pola pikir, norma, dan nilai yang berkembang selama puluhan tahun di kedua sisi tembok Berlin memerlukan waktu dan upaya besar untuk disatukan. Selain itu, Jerman juga menghadapi tantangan integrasi akibat gelombang migrasi besar-besaran, terutama pasca krisis pengungsi pada tahun 2015.

Dalam menghadapi tantangan ini, nilai-nilai budaya seperti disiplin, keteraturan, dan tanggung jawab sosial (Rahmah et al., 2024) terbukti berperan penting dalam menjaga kohesi masyarakat. Gericke et al. (2018) berpendapat bahwa nilai-nilai ini tidak hanya menjadi landasan bagi keberhasilan ekonomi, tetapi juga membentuk fondasi kuat bagi penerimaan dan adaptasi kelompok-kelompok baru. Dengan latar belakang tersebut, tulisan ini berupaya mengkaji lebih dalam bagaimana konsep integrasi dipahami dalam budaya Jerman serta nilai-nilai budaya apa saja yang mendukung proses integrasi tersebut. Melalui studi komparatif ini, diharapkan dapat ditemukan relevansi dan pelajaran berharga yang dapat diterapkan dalam upaya memperkuat integrasi bangsa di Indonesia, sehingga keragaman tidak hanya menjadi identitas, tetapi juga kekuatan nyata yang mempersatukan.

Indonesia dikenal juga sebagai negara yang memiliki keragaman budaya, bahasa, suku bangsa, dan agama yang sangat luas. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat lebih dari 1.300 suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah nusantara dengan latar belakang adat dan budaya yang beragam. Keragaman ini sejatinya merupakan kekayaan sekaligus modal sosial yang besar bagi pembangunan bangsa. Namun, di sisi lain, pluralitas juga dapat memunculkan potensi konflik apabila tidak dikelola dengan baik (Hadijaya et al., 2024). Perbedaan pandangan politik, sosial, maupun budaya kerap menimbulkan gesekan yang dapat mengancam persatuan nasional (Nurjaman, 2021). Oleh karena itu, integrasi bangsa menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak agar Indonesia mampu menjaga keutuhan wilayah serta memperkuat identitas nasional di tengah derasnya arus globalisasi. Dalam konteks global, negara-negara maju seperti Jerman memiliki pengalaman berharga dalam membangun dan mengelola integrasi. Setelah reunifikasi Jerman Timur dan Jerman Barat pada tahun 1990, negara tersebut menghadapi tantangan besar berupa perbedaan budaya, politik, dan ekonomi di antara dua wilayah yang sebelumnya terpisah selama puluhan tahun. Selain itu, Jerman juga menjadi tujuan migrasi besar-besaran, terutama setelah krisis pengungsi tahun 2015. Situasi ini menuntut Jerman untuk menerapkan strategi integrasi yang tidak hanya menekankan pada penyatuan wilayah secara administratif, tetapi juga pada rekonsiliasi sosial, penguatan nilai budaya, dan pembangunan kohesi masyarakat.

Nilai-nilai khas bangsa Jerman seperti disiplin, keteraturan, penghormatan terhadap hukum, serta tanggung jawab sosial terbukti menjadi fondasi yang kuat dalam membangun integrasi yang inklusif. Melihat realitas tersebut, Indonesia dapat mengambil pelajaran penting dari pengalaman Jerman dalam membangun integrasi. Nilai-nilai budaya lokal Indonesia, seperti semangat gotong royong, musyawarah, dan toleransi antarumat beragama, sejatinya memiliki kesamaan esensial dengan nilai-nilai integrasi di Jerman (Anam et al., 2022). Perbedaannya terletak pada penekanan: Indonesia lebih mengedepankan aspek kolektivitas, sedangkan Jerman menekankan konsistensi individu serta kepatuhan terhadap aturan hukum. Perbandingan ini dapat memperkaya strategi Indonesia dalam memperkuat persatuan nasional, khususnya dalam menghadapi tantangan modern seperti polarisasi politik, arus globalisasi. Dengan demikian, penelitian mengenai integrasi bangsa Indonesia dalam perspektif budaya Jerman menjadi relevan dan penting untuk dikaji. Kajian ini tidak hanya memberikan gambaran teoretis mengenai konsep integrasi, tetapi juga menghadirkan alternatif solusi praktis yang dapat diterapkan di Indonesia. Melalui pendekatan komparatif, diharapkan dapat ditemukan titik temu antara kekuatan nilai-nilai lokal bangsa Indonesia dengan pengalaman internasional, sehingga integrasi tidak hanya menjadi semboyan, tetapi juga terwujud dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif komparatif. Penggunaan pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan pola-pola yang muncul dari dua atau lebih kasus (Ali et al., 2022). Data penelitian dikumpulkan dengan meneliti beberapa buku, jurnal ilmiah, dan dokumen terpercaya yang relevan dengan topik yang berfokus pada nilai-nilai integrasi di Indonesia dan Jerman. Metode pengumpulan data ini, menurut Sari et al. (2025), dikenal sebagai triangulasi data, yang bertujuan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan. Analisis data dilakukan secara komparatif, yaitu dengan membandingkan konsep dan nilai budaya dari kedua negara tersebut. Perbandingan sistematis ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi variabel-variabel kunci yang berkontribusi pada suatu fenomena. Tujuannya adalah untuk melihat relevansi pengalaman Jerman dalam upaya penguatan integrasi bangsa di Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Integrasi Dalam Budaya Jerman

Dalam budaya Jerman, integrasi dianggap sebagai proses sosial yang tidak hanya menggabungkan kelompok-kelompok dengan latar belakang berbeda, tetapi juga mendorong prinsip kesatuan dalam keberagaman (Ünver, 2006). Integrasi di Jerman sering dikaitkan dengan keberadaan masyarakat yang beragam, terutama akibat dari migrasi massal setelah Perang Dunia II hingga masa globalisasi saat ini. Pemerintah Jerman mendefinisikan integrasi sebagai kemampuan individu atau kelompok asing untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik negara tersebut, tanpa harus meninggalkan identitas budaya aslinya. Jadi, integrasi bukanlah proses asimilasi yang memaksa seseorang menghilangkan budaya lama, tetapi merupakan sebuah proses saling mengisi antara pendatang dan masyarakat lokal. Dalam penerapannya, integrasi di Jerman sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang mereka pegang, yakni disiplin dan kebersihan (*Ordnung*) yang menunjukkan penghargaan tinggi terhadap ketertiban dan ketaatan pada aturan, di mana individu dianggap terintegrasi apabila mereka mematuhi peraturan dan menjaga kebersihan bersama. Selain itu, kerja sama dan kinerja juga menjadi aspek penting, sebab masyarakat Jerman menganggap kontribusi terhadap ekonomi sebagai penanda keberhasilan integrasi, dan pendatang dianggap terintegrasi jika mampu mandiri secara finansial serta berkontribusi dalam dunia kerja. Penguasaan bahasa Jerman pun dipandang sebagai bentuk utama untuk terintegrasi, sehingga pemerintah menyediakan kursus khusus yang mencakup pelajaran bahasa, budaya, dan sistem hukum Jerman. Meski demikian, penghormatan terhadap budaya asli tetap dijaga, karena Jerman mengakui keberagaman budaya melalui kebijakan multikultural dan perayaan budaya asing tetap dihargai selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai inti bangsa Jerman.

Konsep integrasi di Jerman merupakan proses yang dinamis dan berkembang, terutama sejak Jerman mengakui statusnya sebagai negara imigrasi (*Einwanderungsland*) dan setelah pengalaman unik seperti penyatuan kembali serta gelombang migrasi besar-besaran. Selain penekanan pada disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab sosial, terdapat beberapa dimensi penting lainnya dari integrasi dalam budaya Jerman. Pertama, integrasi dipahami sebagai proses dua arah (*wechselseitiger Prozess*) yang membutuhkan upaya dari pendatang dan juga kesiapan masyarakat mayoritas untuk menerima (*Aufnahmebereitschaft der Mehrheitsgesellschaft*). Pendatang wajib berusaha belajar bahasa Jerman dan mematuhi Hukum Dasar (Basic Law) Jerman, sedangkan masyarakat penerima harus menyediakan akses yang adil ke semua bagian masyarakat, seperti pasar tenaga kerja dan pendidikan, serta bersikap terbuka terhadap keragaman. Kedua, integrasi menekankan aspek hukum dan institusional, berbeda dengan konsep asimilasi yang dianggap terlalu membatasi (*overly restrictive*).

Integrasi dipandang sebagai jalan tengah yang mengharuskan pendatang beradaptasi dengan tatanan baru tanpa meninggalkan identitas budaya mereka sepenuhnya, dengan kepatuhan terhadap institusi politik dan hukum sebagai ciri penting menjadi bagian dari bangsa Jerman. Keberhasilan

integrasi sangat bergantung pada faktor-faktor seperti keterampilan bahasa, akses pendidikan, dan peluang kerja, sehingga fokus utama pemerintah sering kali diarahkan pada integrasi ke dalam pasar kerja melalui pendidikan dan peningkatan kemampuan berbahasa Jerman. Ketiga, identitas nasional Jerman yang menjadi acuan integrasi tidak hanya berbasis warisan (*heritage-based*) seperti bahasa dan budaya, tetapi juga berbasis ideologi (*ideology-based*) yang berpusat pada nilai demokrasi, kesejahteraan, kebebasan, ekonomi, dan keselamatan. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan terhadap sistem nilai politik dan sosial Jerman adalah komponen kunci dalam integrasi. Keempat, peran budaya penyambutan (*Willkommenskultur*) menjadi semakin penting terutama setelah krisis pengungsi 2015, dengan pendekatan yang mendukung integrasi sosial, budaya, dan ekonomi para pengungsi. Pendekatan ini menekankan sikap penyambutan dan peran lembaga sosial, komunitas lokal, serta inisiatif masyarakat sipil dalam mendukung integrasi yang berkelanjutan. Namun, meskipun konsep ini penting, efektivitas penerapannya dalam praktik sehari-hari dan dampaknya terhadap integrasi masih menjadi subjek penelitian yang berkelanjutan.

Nilai Budaya Yang Mendukung Integrasi Di Jerman

Nilai-nilai budaya yang mendukung integrasi di Jerman tidak dapat dilepaskan dari peran bahasa sebagai medium komunikasi utama dalam masyarakat. Kaushik et al. (2016) menekankan bahwa penguasaan bahasa Jerman merupakan faktor sentral yang menentukan keberhasilan integrasi imigran ke dalam ranah pendidikan, pasar kerja, maupun interaksi sosial sehari-hari. Bahasa berfungsi sebagai kultural capital yang memungkinkan individu berpartisipasi secara aktif dalam institusi formal maupun dalam jaringan sosial informal. Selain itu, nilai budaya berupa kedisiplinan, kepatuhan terhadap hukum, serta penghargaan terhadap norma-norma sosial juga dianggap sebagai faktor penting. Nilai-nilai ini menumbuhkan kepercayaan sosial serta memfasilitasi keterlibatan imigran dalam kehidupan bermasyarakat, karena Jerman dikenal sebagai negara dengan orientasi kuat pada aturan dan sistem yang tertata. Dengan demikian, bahasa dan kepatuhan terhadap norma hukum menjadi pintu masuk awal bagi integrasi yang lebih mendalam.

Selain penguasaan bahasa dan kepatuhan hukum, integrasi juga didukung oleh nilai budaya berupa etos kerja, kemandirian ekonomi, serta keterbukaan dalam interaksi sosial. Heckmann, Michalowski, dan Straßburger (2006) menguraikan empat dimensi penting integrasi, yaitu integrasi struktural, kultural, interaktif, dan identifikatif. Integrasi struktural menekankan partisipasi dalam sistem pendidikan, pasar kerja, dan politik; sedangkan integrasi kultural berkaitan dengan adaptasi nilai, norma, dan pola perilaku. Sementara itu, integrasi interaktif menyoroti pentingnya hubungan sosial lintas etnis, dan integrasi identifikatif berkaitan dengan rasa memiliki terhadap masyarakat penerima. Nilai-nilai seperti keterbukaan, solidaritas, dan partisipasi aktif dalam kehidupan sipil membantu membangun jembatan sosial yang memperkuat kohesi antar kelompok. Dengan demikian, integrasi di Jerman tidak hanya ditentukan oleh upaya imigran untuk beradaptasi, tetapi juga oleh kesiapan masyarakat dan institusi penerima dalam menciptakan ruang sosial yang inklusif.

Relevansi Pengalaman Jerman Terhadap Integrasi Bangsa Indonesia

Pengalaman Jerman dapat menjadi cermin berharga bagi Indonesia dalam upaya memperkuat integrasi bangsa. Salah satu contoh nyata adalah adanya Integrationskurs atau kursus integrasi bagi pendatang di Jerman, yang mengajarkan bahasa, budaya, nilai toleransi, serta sistem politik. Hal ini membantu menciptakan kohesi sosial di tengah keragaman penduduknya. Indonesia yang memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa dapat meniru pendekatan serupa melalui pendidikan multikultural dan penguatan wawasan kebangsaan sejak dini. Selain itu, etos kerja masyarakat Jerman yang menekankan disiplin, ketepatan waktu, integritas, dan orientasi pada kualitas juga relevan bagi Indonesia dalam membangun masyarakat yang lebih produktif dan berdaya saing.

Jerman juga menunjukkan keteladanan dalam mengelola sejarah. Mereka berani menghadapi masa lalu, seperti tragedi Holocaust, dengan membangun museum dan memorial yang mengingatkan generasi muda agar peristiwa kelam tidak terulang (Tomann et al., 2014). Bagi Indonesia, hal ini penting untuk memperkuat rekonsiliasi nasional dan memperkokoh identitas bangsa melalui transparansi sejarah. Di bidang pendidikan, pertukaran pelajar Indonesia–Jerman telah membangun pemahaman lintas budaya yang memperluas wawasan generasi muda dalam menghargai keberagaman. Lebih jauh lagi, Jerman juga berhasil mengintegrasikan kebijakan publik dan ekonomi secara terstruktur, termasuk dalam penerapan ekonomi sirkular yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan swasta (Media Indonesia, 2024). Bagi Indonesia, integrasi kebijakan serupa akan memperkuat pemerataan pembangunan dan meningkatkan daya saing nasional. Dengan demikian, pengalaman Jerman menunjukkan bahwa integrasi bangsa membutuhkan kombinasi antara pendidikan, etos kerja, pengelolaan sejarah, dan kebijakan publik yang inklusif

Pengalaman Jerman dalam merancang dan menerapkan kebijakan integrasi memberikan pelajaran penting bagi konteks Indonesia, terutama dalam hal perumusan strategi yang sistemik, berlapis, dan berbasis pada koordinasi antarlembaga. Di Jerman, integrasi dipahami sebagai proses multidimensional yang melibatkan kebijakan di tingkat nasional, regional, dan lokal. Pemerintah Jerman, misalnya, tidak hanya menekankan peran masyarakat sipil atau mekanisme pasar, tetapi juga mengembangkan program integrasi formal seperti kursus bahasa, pendidikan orientasi kewarganegaraan, serta kebijakan tenaga kerja yang memungkinkan imigran berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial-ekonomi. Selain itu, keberhasilan integrasi juga ditopang oleh keterlibatan pemerintah daerah yang menyesuaikan kebijakan dengan kondisi masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi yang efektif hanya dapat dicapai melalui sinergi antara dukungan struktural berupa akses pendidikan, pasar kerja, dan layanan sosial dengan intervensi kebijakan yang terkoordinasi secara vertikal dan horizontal. Relevansinya bagi Indonesia terletak pada perlunya membangun kerangka kebijakan integrasi yang jelas baik di tingkat nasional maupun daerah untuk merespons tantangan migrasi internal, urbanisasi yang cepat, maupun masuknya pekerja asing. Dengan demikian, pengalaman Jerman dapat dijadikan rujukan bahwa integrasi harus dipandang sebagai agenda strategis negara, bukan hanya urusan komunitas tertentu.

Selain dimensi kebijakan, pengalaman Jerman juga memperlihatkan betapa pentingnya faktor budaya dalam mendukung integrasi, terutama melalui penguasaan bahasa dan akses pendidikan. Esser (2006) menegaskan bahwa kompetensi bahasa menjadi modal utama yang membuka peluang lebih besar dalam pendidikan, pasar tenaga kerja, dan partisipasi sosial, sekaligus mengurangi risiko terbentuknya stratifikasi etnis. Dalam konteks integrasi sosial, Jerman memandang bahasa bukan hanya sarana komunikasi, melainkan juga kunci pembentukan identitas bersama. Heckmann (2005) bahkan menekankan empat dimensi penting integrasi, yaitu struktural, kultural, interaktif, dan identifikatif. Keempat dimensi ini saling melengkapi dalam mendorong imigran maupun masyarakat penerima untuk beradaptasi dan membangun kohesi sosial. Dari sisi institusional, Jerman menunjukkan bahwa program integrasi harus dipandang sebagai proses jangka panjang yang menuntut perubahan timbal balik: imigran menyesuaikan diri dengan norma dan sistem yang ada, sementara masyarakat penerima memperluas inklusivitas melalui pengembangan kapasitas layanan publik dan keterlibatan komunitas lokal. Relevansi bagi Indonesia adalah pentingnya menempatkan pendidikan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan kebijakan pasar tenaga kerja sebagai instrumen utama untuk memperkuat kohesi sosial di tengah keberagaman etnis, budaya, dan agama. Dengan belajar dari pengalaman Jerman, Indonesia dapat memperkaya strategi integrasi bangsa yang tidak hanya menekankan pada semboyan persatuan, tetapi juga pada penciptaan kondisi struktural, kultural, dan sosial yang memungkinkan setiap kelompok berpartisipasi secara setara dalam pembangunan nasional.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian dan analisis mendalam mengenai integrasi dalam budaya Jerman dan cerminnya bagi Indonesia menunjukkan bahwa pemahaman tentang integrasi di Jerman jauh melampaui sekadar menyatukan berbagai kelompok yang memiliki latar belakang berbeda, karena integrasi dipahami sebagai sebuah proses sosial yang amat dinamis, berakar pada prinsip kesatuan dalam keberagaman (*Einheit in der Vielfalt*). Sejak berakhirnya Perang Dunia II, terutama dengan masuknya gelombang migrasi besar-besaran, Jerman yang kini secara resmi mengakui dirinya sebagai negara imigrasi (*Einwanderungsland*) melihat integrasi sebagai jembatan yang menghubungkan pendatang dengan masyarakat lokal. Pemerintah Jerman mendefinisikan integrasi bukan sebagai pemaksaan untuk meninggalkan identitas asli atau asimilasi, melainkan sebagai upaya timbal balik yang memungkinkan individu atau kelompok pendatang berpartisipasi secara aktif dalam seluruh sendi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik negara. Proses ini diibaratkan sebagai sebuah pertukaran budaya, di mana pendatang membawa serta warisan mereka, sementara masyarakat mayoritas harus membuka diri dan menyediakan ruang.

Dalam praktik sehari-hari, konsep integrasi ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya inti Jerman yang dipegang teguh. Nilai *Ordnung* atau disiplin, ketertiban, dan kebersihan menjadi prasyarat fundamental, karena rasa hormat terhadap aturan dan ketertiban dipandang sebagai penanda pertama dari adaptasi sosial. Individu dianggap telah terintegrasi jika mereka mematuhi hukum serta menjaga kebersihan dan keteraturan lingkungan bersama. Selain itu, kinerja dan kontribusi ekonomi merupakan tolok ukur penting, sebab seseorang yang mandiri secara finansial dan memberikan kontribusi pada perekonomian negara dianggap telah menemukan tempatnya dalam tatanan masyarakat Jerman. Bahasa Jerman juga dipandang bukan hanya sebagai alat komunikasi, melainkan sebagai kunci kultural (*cultural capital*). Oleh karena itu, pemerintah menyediakan *Integrationskurs* atau kursus integrasi yang tidak hanya mengajarkan tata bahasa, tetapi juga mengenalkan sistem hukum, sejarah, serta nilai-nilai fundamental Jerman. Di samping itu, integrasi dipahami sebagai proses dua arah (*Wechselseitiger Prozess*) yang menuntut upaya dari kedua belah pihak, di mana pendatang wajib beradaptasi dengan tatanan hukum dan bahasa, sementara masyarakat penerima (*receiving society*) berkewajiban membuka akses yang adil dan setara ke pasar kerja, pendidikan, serta bersikap terbuka terhadap keragaman. Konsep integrasi di Jerman juga berkembang hingga melahirkan ide tentang identitas berbasis ideologi (*Ideology-based Identity*), yang menekankan bahwa penerimaan terhadap nilai-nilai demokrasi, kesejahteraan, dan kebebasan jauh lebih penting dibanding sekadar warisan budaya. Setelah krisis pengungsi tahun 2015, lahirlah pula budaya penyambutan (*Willkommenskultur*) sebagai upaya masyarakat sipil dan komunitas lokal untuk mendukung integrasi sosial dan budaya para pendatang.

Integrasi yang berhasil di Jerman tidak mungkin berdiri tanpa fondasi nilai budaya yang kuat dan terstruktur. Nilai-nilai ini menjadi jangkar bagi para pendatang sekaligus cetak biru bagi kebijakan pemerintah. Intinya adalah penghormatan terhadap martabat manusia dan perlindungan hak asasi yang tercantum dalam Hukum Dasar (*Basic Law*), meliputi kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, serta persamaan di hadapan hukum. Prinsip-prinsip sentral yang menopang integrasi di Jerman antara lain demokrasi dan *Rechtsstaat* atau negara hukum, di mana setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama dan kepatuhan terhadap institusi politik serta hukum menjadi ciri utama dalam menjadi bagian dari bangsa Jerman. Selain itu, toleransi dan keberagaman juga menjadi nilai penting, karena masyarakat multikultural menuntut sikap saling menghargai agar warga asli dan pendatang dapat hidup berdampingan. Solidaritas kolektif pun hadir sebagai prinsip lain, sebab negara dan masyarakat merasa bertanggung jawab bersama terhadap keberhasilan integrasi melalui dukungan berupa kursus bahasa dan pelatihan kerja sehingga integrasi tidak hanya menjadi beban individu. Esser (2006) menegaskan bahwa kompetensi bahasa Jerman merupakan faktor sentral bagi kesuksesan imigran dalam memperoleh akses ke pendidikan, pasar kerja, dan jaringan sosial, karena bahasa bukan sekadar penerjemah kata, melainkan pembuka peluang.

Selain bahasa dan kepatuhan hukum, studi oleh Heckmann, Michalowski, dan Straßburger (2006) membagi integrasi menjadi empat dimensi yang saling melengkapi. Integrasi struktural menekankan partisipasi nyata dalam pendidikan, pasar kerja, dan kehidupan politik. Integrasi kultural mengacu pada adaptasi terhadap nilai, norma, serta pola perilaku masyarakat Jerman. Integrasi interaktif menekankan pembentukan hubungan dan jaringan sosial lintas etnis. Integrasi identifikatif berhubungan dengan perasaan memiliki serta keterikatan emosional terhadap masyarakat penerima. Keempat dimensi ini menegaskan bahwa integrasi membutuhkan keterbukaan, etos kerja, dan kemandirian ekonomi dari imigran sekaligus kesiapan institusi dan masyarakat lokal untuk menjadi inklusif.

Pengalaman Jerman dalam mengelola keragaman dan integrasi dapat menjadi cermin berharga bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 1.300 suku bangsa. Integrasi di Jerman menunjukkan bahwa hal ini adalah agenda strategis negara yang memerlukan kerangka kebijakan sistemik dan berlapis. Indonesia dapat belajar bahwa strategi kebijakan integrasi harus sistemik dan terkoordinasi, sebagaimana Jerman yang melakukan sinergi vertikal dan horizontal antara kebijakan nasional, regional, dan lokal. Hal ini relevan bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan migrasi internal, urbanisasi, maupun pekerja asing, sehingga integrasi menjadi isu koordinasi antarlembaga, bukan sekadar urusan satu kementerian tertentu. Pendidikan dan cultural capital juga penting, karena program Integrationskurs di Jerman mengisyaratkan perlunya pendidikan multikultural dan penguatan wawasan kebangsaan sejak dini. Oleh sebab itu, Indonesia perlu memperkuat pendidikan yang mengajarkan bahasa nasional, nilai toleransi, serta sistem politik kepada seluruh warga sebagai kunci pembentukan identitas bersama dan modal sosial.

Selain itu, etos kerja masyarakat Jerman yang mengedepankan disiplin, ketepatan waktu, integritas, dan orientasi kualitas juga relevan diterapkan di Indonesia untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa. Pengelolaan sejarah secara transparan, sebagaimana Jerman menghadapi masa lalu kelam seperti tragedi Holocaust dengan museum dan memorial, dapat menjadi teladan penting bagi Indonesia agar rekonsiliasi nasional dan kohesi sosial terwujud. Mengadopsi kerangka Heckmann (2005), Indonesia pun perlu memahami integrasi tidak hanya dari aspek struktural seperti akses pekerjaan, tetapi juga dari aspek kultural, interaktif, dan identifikatif sehingga setiap kelompok dapat berpartisipasi secara setara sekaligus merasa memiliki negara ini seutuhnya. Dengan demikian, pengalaman Jerman menegaskan bahwa integrasi bangsa yang sukses bergantung pada kombinasi kokoh antara dukungan struktural berupa akses pendidikan dan pasar kerja yang adil, intervensi kebijakan yang terkoordinasi, serta fondasi budaya berupa toleransi, solidaritas, dan kepatuhan hukum yang kuat. Dalam pandangan ini, keragaman bukanlah sumber konflik, melainkan modal sosial yang memperkuat pembangunan nasional sekaligus meningkatkan daya saing bangsa di kancah global.

KESIMPULAN

Integrasi dalam budaya Jerman dipahami sebagai proses sosial yang menyatukan kelompok dengan latar belakang berbeda sambil tetap menghormati identitas budaya asli. Proses ini menekankan partisipasi aktif pendatang dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, serta dukungan nilai-nilai budaya seperti disiplin, keteraturan, kerja sama, penguasaan bahasa, dan penghormatan terhadap keberagaman. Prinsip demokrasi, hak asasi manusia, persamaan kesempatan, toleransi, dan solidaritas kolektif menjadi fondasi penting yang memungkinkan integrasi berjalan efektif dan berkelanjutan. Selain itu, integrasi di Jerman dimaknai sebagai proses dua arah yang menuntut adaptasi dari pendatang sekaligus kesiapan masyarakat mayoritas untuk menerima keberagaman. Faktor hukum dan institusional memegang peran sentral, di mana kepatuhan terhadap aturan serta akses pendidikan dan pasar kerja menjadi penopang utama keberhasilan integrasi. Identitas nasional pun tidak hanya berbasis warisan budaya, tetapi juga berbasis ideologi yang berlandaskan demokrasi, kesejahteraan, kebebasan, dan keamanan. Hal ini diperkuat dengan munculnya Willkommenskultur (budaya penyambutan) yang

mendorong solidaritas dan dukungan masyarakat sipil terhadap imigran, meskipun efektivitasnya masih terus menjadi bahan kajian. Penguasaan bahasa Jerman terbukti menjadi faktor paling menentukan dalam membuka akses pendidikan, pasar kerja, dan partisipasi sosial.

Pengalaman Jerman menunjukkan bahwa keberhasilan integrasi tidak semata bergantung pada upaya individu, tetapi juga memerlukan dukungan institusional melalui pendidikan multikultural, kursus bahasa, pelatihan kerja, dan kebijakan publik yang terkoordinasi di tingkat nasional maupun daerah. Pendekatan ini tidak hanya menciptakan kohesi sosial dan harmonisasi antarbudaya, tetapi juga membentuk masyarakat yang produktif, inklusif, dan berdaya saing. Relevansinya bagi Indonesia sangat nyata, mengingat bangsa ini juga menghadapi tantangan besar dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman budaya, agama, dan etnis. Dari Jerman, Indonesia dapat belajar bahwa integrasi harus dipandang sebagai agenda strategis negara yang membutuhkan kerangka kebijakan jelas, sinergi antar-lembaga, serta dukungan budaya berupa toleransi, solidaritas, dan penghargaan terhadap hukum. Dengan demikian, keragaman dapat dijadikan modal sosial yang memperkuat identitas nasional sekaligus meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi tantangan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. M., Hariyati, T., Pratiwi, M. Y., & Afifah, S. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Penerapan Nya Dalam Penelitian. *Education Journal.*, 2(2).
- Anam, F. K., Ikhsan, M. A., Hanafi, Y., & Adzim, A. (2022). Internalisasi nilai karakter religius nasionalis untuk mencegah paham transnasional radikal di Indonesia dan Jerman. *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 18(2), 181–193. <https://doi.org/10.20414/transformasi.v18i2.5886>
- Gericke, D., Burmeister, A., Löwe, J., Deller, J., & Pundt, L. (2018). How do refugees use their social capital for successful labor market integration? An exploratory analysis in Germany. *Journal of Vocational Behavior*, 105, 46–61. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2017.12.002>
- Hadijaya, Y., Fahrezi, M., Intan, N., Wasiyem, W., Zakiyah, N., & Azhari, M. T. (2024). Konsep Multikulturalisme dan Pluralisme dalam Pendidikan. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3), 3101–3108. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.3790>
- Jamrizal, J., Hatta, J., Rafii, M., & Rahman, M. A. (2025). MEMBANGUN KAMPUNG RAMAH KEBERAGAMAN: PENDEKATAN MODAL SOSIAL DI KELURAHAN KENALI BESAR, KECAMATAN ALAM BARAJO, KOTA JAMBI. *Jurnal Abdi Insani*, 12(5), 1917–1926. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v12i5.2474>
- Kaushik, V., Walsh, C. A., & Haefele, D. (2016). Social Integration of Immigrants within the Linguistically Diverse Workplace: A Systematic Review. *Review of Social Sciences*, 1(1). <https://doi.org/10.18533/rss.v1i1.5>
- Nurjaman, A. (2021). Tantangan primordialisme dalam upaya membangun budaya politik nasional. *Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, 5(2), 370–383. <https://doi.org/10.22219/satwika.v5i2.17990>
- Pickel, S., & Pickel, G. (2023). The Wall in the Mind – Revisited Stable Differences in the Political Cultures of Western and Eastern Germany. *German Politics*, 32(1), 20–42. <https://doi.org/10.1080/09644008.2022.2072488>
- Rahmah, Y., Suriansyah, A., & Cinantya, C. (2024). Penguatan Pendidikan Karakter Disiplin dan Tanggung Jawab Siswa di Sekolah Dasar. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(4), 1974–1982. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i4.547>
- Sari, A. S., Aprisilia, N., & Fitriani, Y. (2025). Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Observasi, Wawancara, dan Triangulasi. *Indonesian Research Journal on Education*, 5(4), 539–545. <https://doi.org/10.31004/irje.v5i4.3011>

- Tomann, J., Nießer, J., Rüsen, J., Traba, R., Zündorf, I., Ventzke, M., Obermüller, G., Prüfer, T., Hübinger, G., & C/O Edv Fotowerk Huber, E. Z. (2014). *Angewandte Geschichte: Neue Perspektiven auf Geschichte in der Öffentlichkeit* (J. Nießer & J. Tomann, Eds.). Brill | Schöningh. <https://doi.org/10.30965/9783657777181>
- Ünver, O. C. (2006). Current Discussions in the German Integration Debate: The Culturalist Vision vs. Social Equity? *Revue Européenne Des Migrations Internationales*, 22(3), 23–38. <https://doi.org/10.4000/remi.3241>